

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN
DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Pada Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

NURBAETI
161410222

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diajukan pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 4 Mei 2020

NURBAETI
NIM.161410222

ABSTRAK

Nama: **Nurbaeti**, NIM: **161410222**, judul skripsi: **Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, untuk itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten?, 2) Bagaimana kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, 2) Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama periode.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis rasio keuangan daerah dan metode non parametrik *Data Analysis Envelopment* (DEA) dengan asumsi *Variabel Return to Scale* (VRS) berorientasi output.

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio, Efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat dua pemerintah daerah yang dapat dikategorikan cukup efisien yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan analisis tingkat efektivitas terdapat 7 kabupaten dan kota yang dikategorikan sangat efektif dan satu dikategorikan efektif yaitu Kota Cilegon. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah menggunakan metode DEA dengan pendekatan intermediasi, berasumsi VRS dan berorientasi output secara individu menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat satu pun pemerintah daerah yang mampu menghasilkan serta mempertahankan score efisiensi secara maksimum mencapai 100%.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas dan Kinerja Keuangan

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Usulan Munaqasyah
a.n. Nurbaeti
NIM. 161410222

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkmaklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Nurbaeti, NIM. 161410222** dengan judul Skripsi “**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten**”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Serang, 4 Mei 2020

Pembimbing II

Dr. Efi Syarifudin, M.M
NIP. 19780314200501 1 005

Hj. Mukhlisatul Jannah, M.M., M.Ak
NIP. 19740822200501 2 003

PERSETUJUAN

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN
DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN**

Oleh :

NURBAETI
NIM.161410222

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efi Syarifudin, M.M
NIP. 19780314 200501 1 005

Hj. Mukhlisotul Jannah, M.M., M.Ak
NIP. 19740822200501 2 003

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.Si
NIP. 196402121991022003

Hj. Mukhlisotul Jannah., M.M., M.Ak.
NIP. 19740822200501 2 003

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Nurbaeti, NIM: 161410222 yang berjudul **Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 2020. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 2020

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

Anggota

Penguji I

Penguji II

.....
NIP.

.....
NIP

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efi Syarifudin, M.M
NIP.196402121991022003

Hj. Mukhlisatul Jannah, M.M., M.Ak
NIP.19740822200501 2 003

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah yang sangat sederhana ini kupersembahkan untuk sosok yang telah rela mengorbankan tidurnya, mengorbankan keringatnya dan mengorbankan segala-galanya untuk penulis, tidak lain yaitu kedua orang tua Ibunda Masni dan Ayahanda Bayi (Alm) serta keempat kakak penulis Edi Sukaedi, Misri Kusmawan, Gunawan dan Jumhari.

**Semoga Allah swt membalas serta meridhoi dan memudahkan segala bentuk urusannya, bahagiakan akhiratnya dan dunianya
aamiinn.....**

MOTTO

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat yang dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

(QS. Al-Israa':26)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurbaeti lahir di kabupaten pandeglang pada tanggal 1 Januari 1997. Penulis adalah anak kelima dari lima ber saudara. Orang tua penulis berna Bayi (Alm) dan Masni. Pendidikan formal yang ditempuh Penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN Kolelet 2 lulus pada tahun 2009
2. MTs Li-Ulil Albab lulus pada tahun 2012
3. SMAN 12 Pandeglang lulus pada tahun 2015
4. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2020.

Selama masih kuliah penulis juga aktif di organisasi luar dan dalam kampus:

1. HMJ Ekonomi Syariah 2017,
2. DEMA FEBI 2018 dan 2019,
3. HMBM UIN SMH Banten,
4. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) KES UIN SMH Banten
5. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan
6. UIN Banten Beatbox.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah berjasa ,emsiarkan agama islam, sehingga umat islam terbimbing kejalan yang benar.

Alhamdulillah, dengan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kabupaten di Provinsi Banten” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan penulis menyadari akan pentingnya orang-orang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara materil dan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya orang-orang tersebut segala macam halangan dan rintangan yang menghambat penulisan skripsi dapat terselesaikan, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah berusaha menjadikan UIN SMH Banten menjadi lebih baik lagi.
2. Ibu Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, yang telah memberikan support kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Hj. Mukhlisotul Jannah, M.M., M.Ak. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti.
4. Bapak Aan Ansori, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segala perhatiannya selalu memperhatikan perkembangan akademik dan memberikan arahan yang terbaik selama masih kuliah.
5. Bapak Dr. Efi Syarifudin, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang dengan keikhlasannya memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang berarti selama proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah membalas kebaikan bapak.
6. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Staf Akademik, Staf Umum Keuangan dan Administrasi, Pegawai Perpustakaan, dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama ini.

8. Bapak Andi Gunawan, S.E yang telah banyak memberikan arahan, semangat serta mendidik penulis menjadi orang yang kuat mental dan tidak menjadi perempuan lemah. Terima kasih bapak, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
9. Seluruh Staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang telah membantu dalam memberikan segala bantuan baik informasi maupun data yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Nazhat Afza Ramadhanti, Tatu Ismaya, Yusi Masrurotin, Siti Sakiyah, Iin dan Indri Mulyadini yang selalu menemani dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Ilham Hibatullah, Anggita Nurcahyani, Ismiyati dan Shyndi Aulia Vramesti yang telah memberikan banyak pengalaman luar biasa kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, motivasi, dukungan dan bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala dan keberkahan yang tidak terhitung jumlahnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari susunan kalimat, penyajian data secara

teoritis dan praktis, dan penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca Aamiin.

Serang, 4 Mei 2020

Penulis

Nurbaeti
NIM.161410222

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Otonomi Daerah	15
B. Keuangan Daerah	17
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	27
D. Kinerja Keuangan Daerah	29
E. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Keuangan Daerah	39
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	46
G. Hipotesis Penelitian	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	50
B. Metode Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53

G. Operasional Variabel Penelitian	61
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	63
B. Hasil Analisis.....	65
1. Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Analisis Rasio	65
2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Analisis Rasio	68
3. Hasil Analisis Non Parametrik <i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i>	71
C. Pembahasan Hasil Penelitian	88
D. Analisis Ekonomi	98
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DATAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	13
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian	64
Tabel 4.2 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 2015-2018 Menggunakan Analisis Rasio	65
Tabel 4.3 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 2015-2018 Menggunakan Analisis Rasio.	68
Tabel 4.4 Tingkat Efisiensi Kota Tangerang Selatan	72
Tabel 4.5 Tingkat Efisiensi Kota Tangerang	73
Tabel 4.6 Tingkat Efisiensi Kabupaten Tangerang.....	75
Tabel 4.7 Tingkat Efisiensi Kabupaten Serang	77
Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi Kota Serang	79
Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Kota Cilegon.....	80
Tabel 4.10 Tingkat Efisiensi Kabupaten Pandeglang	82
Tabel 4.11 Tingkat Efisiensi Kabupaten Lebak	83
Tabel 4.12 Efisiensi Rata-Rata Pengelolaan Keuangan Daerah	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Rata-Rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	67
Grafik 4.2 Rata-Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	70
Grafik 4.3 Tingkat Efisiensi Kota Tangerang Selatan	72
Grafik 4.4 Tingkat Efisiensi Kota Tangerang	74
Grafik 4.5 Tingkat Efisiensi Kabupaten Tangerang	76
Grafik 4.6 Tingkat Efisiensi Kabupaten Serang	77
Grafik 4.7 Tingkat Efisiensi Kota Serang	79
Grafik 4.8 Tingkat Efisiensi Kota Cilegon	81
Grafik 4.9 Tingkat Efisiensi Kabupaten Pandeglang.....	82
Grafik 4.10 Tingkat Efisiensi Kabupaten Lebak.....	84
Grafik 4.11 Efisiensi Rata-Rata Individu Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	86
Grafik 4.12 Efisiensi Rata-Rata Pengelolaan Keuangan Daerah	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Halim menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan daerah otonomi, yaitu:

(1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar².

Serta yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawab daerah. Sedangkan yang dimaksud keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

¹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 347

² Dori saputra, “*analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat*”. Artikel ilmiah (2014). Hal 2

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dari segi faktor keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Banten memiliki berbagai daerah yang berbeda, salah satu kota yang memiliki pendapatan yang selalu meningkat dibandingkan kota atau kabupaten lain yang adalah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota lainnya selalu mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak selalu menduduki posisi terakhir di Provinsi Banten atau sebagai kabupaten yang mendapatkan PAD yang kecil dibandingkan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Banten disetiap tahun pada tahun 2015 sampai dengan 2018.

Alasannya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selalu diikuti dengan jumlah dana berimbang yang selalu meningkat, sedangkan daerah otonom harus seminim mungkin ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dan pengelolaan keuangan daerah semakin efisien.

Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pengukuran rasio efektivitas penting dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD yang termasuk komponen penting pada Daerah Otonom, dikatakan efektif bila mencapai 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Selain rasio efektivitas hal yang penting dalam melaksanakan melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah adalah menekan biaya pengeluaran daerah. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah³. APBD merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 5

mempunyai fungsi otoritas yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah⁴.

Keberhasilan menggali dan meningkatkan pendapatan daerah harus diimbangi dengan keberhasilan daerah dalam menekan pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah atau belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.⁵ Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan keuangan daerah.

Stevany H Dethan berkata bahwa:

Belanja daerah haruslah dapat diimbangi dengan penerimaan daerahnya. Hal ini disebabkan, jika belanja daerah yang tidak dapat diimbangi oleh penerimaan daerah maka akan terjadi deficit anggaran daerah. Sebaliknya apabila penerimaan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka akan terjadi surplus anggaran daerah. Surplus anggaran daerah ini disebabkan karena adanya efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan daerah.⁶

Tidak ada perkembangan yang signifikan memang di Provinsi Banten, dua kota yang menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon merupakan kota industri yang memang sudah berkembang bahkan sebelum lepas dari Provinsi Jawa Barat.

⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 6

⁵ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta:BPFE, 2012), 95.

⁶ Stevany H Dethan, *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Vol X, No. 1, (Desember 2016), 58

Hal ini jelas menunjukkan bahwa otonomi daerah, khususnya untuk Provinsi Banten gagal dalam mencapai tujuannya.

Meskipun terlihat terdapat peningkatan dalam kontribusi PAD dalam pendapatan daerah, tetapi hal ini belum terjadi secara merata. Hanya beberapa daerah saja yang sudah dapat menyumbang PAD dalam jumlah besar.

Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah dan penilaian kinerja keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya dibidang keuangan. Pertanggungjawaban keuangan kepala daerah kabupaten atau kota di Provinsi Banten telah dilakukan sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dihadapan DPRD Kabupaten dan Kota. Namun, pertanggungjawaban tersebut belum dilengkapi dengan informasi tentang bagaimanakah kinerja keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom agar dapat diperoleh penilaian kinerja keuangan yang lebih komprehensif dalam melaksanakan otonomi keuangan daerah. Dalam kaitan ini sangatlah relevan dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial yang akan diteliti adalah kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi efektivitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah

dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan. Cakupan penelitian yang dilakukan meliputi efektivitas dan kemandirian keuangan daerah tiap-tiap tahun⁷.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehongga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan keuangan daerah dan dapat mengukur kontribusi masingmasing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Abdul Halim:2008).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan daerah berdasarkan tingkat efektivitas dan Efisiensi keuangan daerah. Kemudian bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA**

⁷ Dwirandra, *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Akuntansi. 4

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten hampir semua masih cukup tinggi dibandingkan dengan total pendapatan daerah.
2. Ada beberapa Kabupaten dan Kota yang belum tercapainya Realisasi PAD sesuai dengan target anggaran.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018?
2. Bagaimana kinerja pemerintah berdasarkan tingkat efektivitas keuangan daerah (KKD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018?

D. Pembatasan Masalah

Peneliti hanya meneliti dan berfokus pada tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama kurun waktu empat tahun (2015-2018).

E. Tujuan Penelitian

Setiap usaha seseorang tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini yang bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018.

F. Manfaat Penelitian

Peranan dan manfaat penelitian dalam karya ilmiah sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat melalui dua aspek yaitu :

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis atau Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat membandingkan antara teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan kenyataan

yang didapat di lapangan dalam hal ini mengenai kinerja pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dilihat dari rasio pendapatan daerah pada APBD. Sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana teori tersebut dapat diterapkan dan dimanfaatkan di lingkungan kampus tapi di luar bangku kuliah serta dengan adanya penelitian ini akan melatih penulis dalam memecahkan, mendefinisikan masalah dan menganalisa situasi.

b. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio pendapatan APBD.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kinerja pemerintah daerah dilihat dari rasio pendapatan daerah pada APBD terhadap keberhasilan otonomi daerah.

2. Secara Teoritis

a. Sebagai suatu bahan perbandingan antara teori dan fakta ataupun kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Sebagai suatu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut lagi.

c. Sebagai pengembangan terhadap teori analisis kinerja keuangan pada umumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Upaya pemberdayaan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah⁸. Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat⁹.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu.

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi

⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2004), 9

⁹ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 359

keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dan pengelolaan keuangan daerah semakin efisien.

Secara sederhana efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio yang disebut dengan rasio efektivitas keuangan daerah.

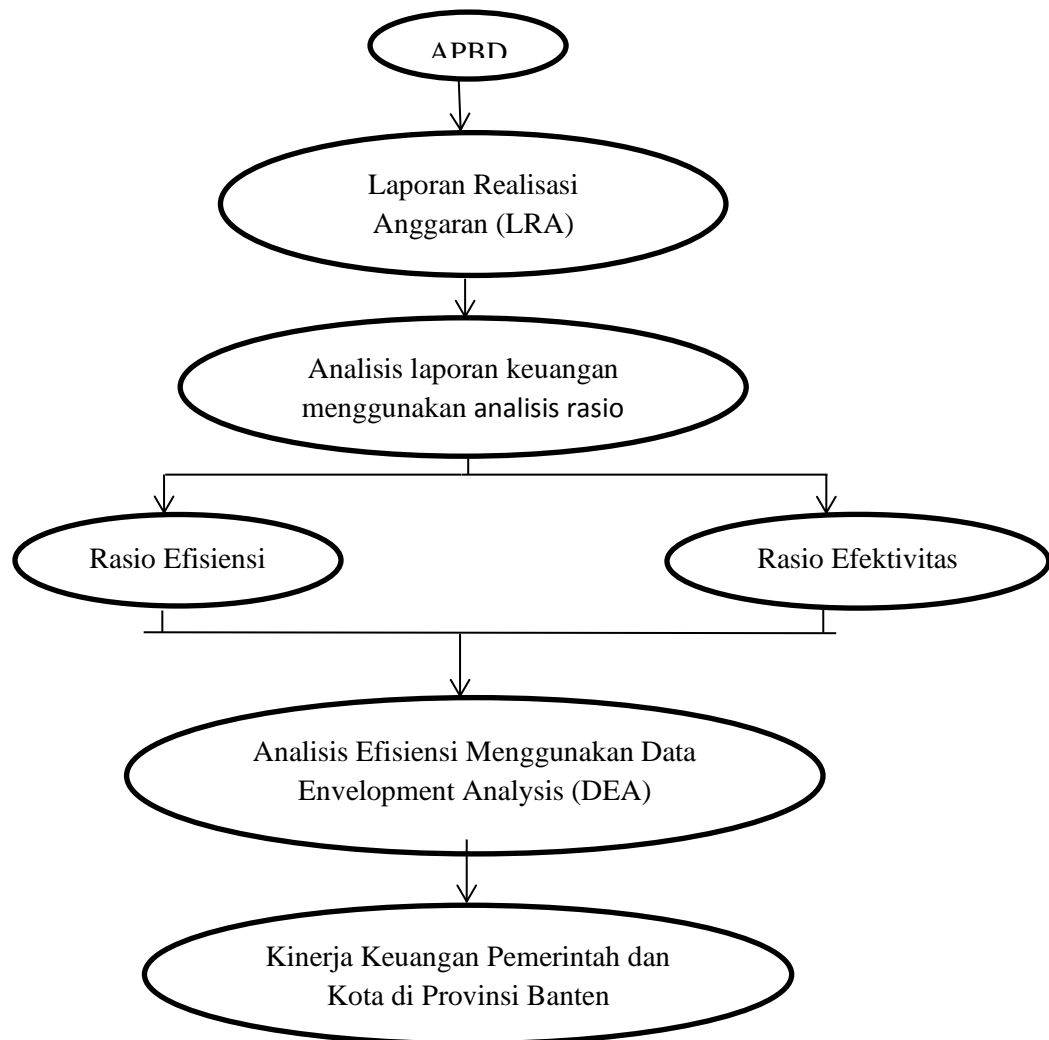
Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan¹⁰. Pengukuran rasio efektivitas penting dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD yang termasuk komponen penting pada Daerah Otonom, dikatakan efektif bila mencapai 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Selain rasio efektivitas hal yang penting dalam melaksanakan melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah adalah menekan biaya pengeluaran daerah. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata

¹⁰ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Edisi Dua* (Yogyakarta : BPFE, 2010),

biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya¹¹.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



¹¹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 234

H. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika pembahasan ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian skripsi ini.

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah,, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka terdiri dari konsep keuangan daerah, pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daeah, efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan daerah, kajian teori yang digunakan menurut perspektif islam, penelitian terdahulu yang relevan serta hipotesis penelitian.

Bab III : Metode penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian, populasi daan sampel, jenis-jenis sumber data, metode analisis data.

Bab IV : Deskripsi hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Menurut UU No. 22 tahun 1999, Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang. Jadi daerah otonom merupakan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.¹²

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999, kewenangan yang diberikan kepada daerah (otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama, berikut kewenangan bidang lain yang tercatum dalam ayat (2). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah apabila pemerintah (pusat)

¹²Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.6

menyerahkan kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan (pasal 9 ayat 1), Bahkan daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya.¹³

Proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meingkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

1. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah

Amamndemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan untuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik di kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, maka perubahan-perubahan

¹³Sri Soemantri, Otonomi Daerah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.13

konsepsi otonomi terlihat banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu.

2. Ciri utama keberhasilan pelaksanaan daerah otonom

Halim menyebutkan Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.¹⁴

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang

¹⁴¹⁴Muhammad Zaenuddin, “evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dengan alat analisis derajat otonomi fiskal daerah, (Malang: Universitas Gajah Mada, 2007), h.2

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Sementara Mamesah menyatakan bahwa “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁵ Keuangan daerah juga dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah lain.

Menurut Halim dari definisi diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

¹⁵Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.230

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.¹⁶

Jadi keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah tertentu berupa uang atau barang yang didalamnya mengandung nilai.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah

¹⁶Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.23, 25, 26

harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah menurut Abdul Halim meliputi beberapa aspek diantaranya :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga,
- c. Penerimaan daerah,
- d. Pengeluaran daerah,
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.¹⁷

2. Pengelolaan keuangan daerah

¹⁷Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 357

Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 1, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan Negara yang di amanatkan dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub-sistem yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86. Pada pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Dalam pengelolaan anggaran atau keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan

Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2007 menyatakan bahwa APBD

harus disusun dengan prinsip-prinsip pokok anggaran sector publik sebagai berikut: (a) partisipasi masyarakat, (b) transparansi dan akuntabilitas anggaran, (c) disiplin anggaran, (d) keadilan anggaran, (e) efisiensi dan efektivitas anggaran, dan (f) taat asas.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sudah tentu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (Accountability), pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan. Unsur tanggungjawab ini adalah meliputi keabsahan dengan berpangkal pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan merupakan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan bahwa semua sumber pendapatan dan penggunaannya tepat dan sah.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus kelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang dipersempit

- d. Efisiensi dan Efektifitas. Tata cara mengurus keuangan daerah harus menggunakan manajemen pengawasan yang baik, sehingga memungkinkan daerah dengan biaya seefisien mungkin dan memerlukan jangka waktu pelaksanaan seefektif mungkin.
- e. Pengendalian. Petugas keuangan daerahm DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar tujuan yang direncanakan bisa tercapai.¹⁸

Menurut Halim Berdasarkan peraturan-peraturan manajemen keuangan daerah memiliki karakteristik antara lain:

- a. Pengertian Daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. Istilah Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, juga kota madya tidak lagi digunakan.
- b. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah ini adalah badan eksekutif, sedang badan legislative di daerah adalah DPRD (pasal 12 UU No.22 Tahun 1999). Oleh karena itu, terdapat pemisahan yang nyata antara legislative dan eksekutif.
- c. Perhitungan APBD menjadi satu laporan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah (pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000).

¹⁸Devas dkk, Keuangan Pemerintah Indonesia. Terjemahan Marsi Maris (Jakarta: UI-Press, 1987), h.279-280

- d. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak Pemda) tetapi masuk dalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak Pemda) masyarakat termasuk didalam unsur-unsur penyusunan APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD.
- e. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup perbandingan antara anggaran dan realisasinya, perbandingan antara standar biaya dan realisasinya, target dan presentase fisik proyek, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
- f. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.
- g. Digunakan akuntansi didalam pengelolaan keuangan daerah.¹⁹

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

¹⁹Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.4

Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

a. Tujuan sistem pengukuran kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum adalah:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

b. Manfaat pengukuran kinerja

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.²⁰

²⁰ Ihyaul ulum, Audit Sektor Publik: Suatu pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 21, 22

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara Abdul Halim menyatakan APBD adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (*financial work plan*) yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislative memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondsleg*) penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

2. Struktur APBD

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.²¹ Pendapatan daerah

²¹Direktorat jenderal perimbangan keuangan, Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia, (Jakarta pusat: Departemen keuangan republik indonesia 2009),h.35

juga dapat di artikan sebagai pendapatan yang di hasilkan oleh daerah tersebut seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS).

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Maka kepada pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber-sumber yang ada di daerah masing-masing, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan azas desentralisasi yang kita anut. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas berikut ini:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.²²

D. Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian, “Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang

²²Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.94

ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.²³

Menurut Sedarmayanti “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan.²⁴

Menurut Mohamad Mahsun “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang terulang dalam *strategic planning* suatu organisasi.²⁵

Sedangkan menurut Mardiasmo, “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan

²³Dori saputra, “*analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat*”. Artikel ilmiah (2014). Hal 7

²⁴Sedarmayanti, Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.64

²⁵Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: BPFE, 2006), h.25

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah perhitungan APBD.²⁶

Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui penetapan rasio keuangan. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Suatu rasio tersebut diperbandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan ini maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi situasi perusahaan dan kinerjanya.

Sedangkan kinerja keuangan adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.²⁷ Kinerja keuangan juga dapat di artikan sebagai suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.²⁸ Jadi dapat disimpulkan

²⁶Mardiaso, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: ANDI, 2004), h.121

²⁷Andri Haryanto, Skripsi: “Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), h.

²⁸Mochamad Fajar Hidayat, Skripsi: “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)”, (Malang: Universitas Negeri Brawijaya, Malang, 2013), h. 7

bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tentu.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

2. Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Abdul Halim hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.²⁹

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.
- e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

²⁹ Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.126

- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
 - j. Mengungkap permasalahan yang terjadi.³⁰
3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

³⁰Dhimas Angga Permana, dan Ikhsan Budi Riarjo, "Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Value For Money", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.6 No.5 (Mei 2015), h.2166

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis shift), rasio proporsi pendapatan dan belanja (analisis share).

a. Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat

mencapai tujuan organisasi tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.³¹ Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.³² Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatann input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.

³¹Ihyaul ulum, Audit Sektor Publik: Suatu pengantar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 26.

³²Mardiasmo, Efisiensi dan Efektivitas (Jakarta: ANDI, 2004), 133

4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.³³

Dalam pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sector publik, efisiensi dapat dibedakan atas: “(1) Efisiensi Alokasi, terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat efektivitas optimal. (2) Efisiensi teknis (manajerial), terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.”³⁴

b. Analisis Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Sementara Mardiasmo mengemukakan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Georgopolous dan Tannbaum dalam bukunya yang berjudul efektivitas organisasi (1985) mengemukakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas harus

³³Ihyaul Ulum, Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 27

³⁴Ihyaul Ulum, Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar, 28

berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Secara sederhana efektivitas merupakan outcome dengan output.

Rasio efektivitas keuangan daerah (selanjutnya disebut “rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yg ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas daerah keuangan otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100

Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

E. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Kinerja Keuangan Daerah

Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD, dana berimbang serta pendapatan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama beberapa periode anggaran. Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkannya dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah maka Allah memberinya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah digariskannya, maka Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya Surat Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا
 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَمَّا
 (88)

Artinya:“...Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan....”³⁵

Menurut Alorfi dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, penilaian kerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Quran yaitu:

1. Keadilan, Kompetensi (QS. An-Nissa ayat 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا (32)

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka

³⁵ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 303

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³⁶

2. Kejujuran (QS. Al-Maidah ayat 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁷

3. Usaha (QS. An-Najm ayat 39)

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39)

Artinya: “Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.³⁸

³⁶ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 83

³⁷ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 108

³⁸ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 527

4. Inisiatif , Pengalaman Kerja (QS. Ar-Raad ayat 11).

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
وَالِ (11)

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”.³⁹

5. Kreativitas individu (QS. Al-Zukhruf ayat 32).

أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مَّمَّا يَجْمَعُونَ (32)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁴⁰

³⁹ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 250

⁴⁰Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 491

Sedangkan menurut Sastrohadiwijoyo dalam Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama serta prakarsa kepemimpinan dari seorang pegawai.

Firman Allah Qs. Al-Ahqaaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19)

Artinya:” dan bagi masing-masing derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka dirugikan.”⁴¹

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Araaf ayat 39:

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39)

Artinya : “Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai

⁴¹ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 504

kelebihan sedikitpun atas kami, Maka rasakanlah siksaan Karena perbuatan yang Telah kamu lakukan".⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.⁴³

6. Prinsip Pendapatan Negara Menurut Perspektif Islam

Dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara, ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri, yaitu sebagai berikut:

a. Harus ada Nash yang memerintahnya

Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus ada Nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahnya. Setiap pendapatan dalam Negara islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga disalurkan sesuai hukum-hukum syara'⁴⁴. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah [2]:188

⁴² Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 155

⁴³Rafida. "Analisis Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Jambi". Jurnal Naral Fiqh, Vol 9 No.1 (2014). h.10

⁴⁴ Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, Edisi terjemahan oleh Ahmad S, dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002),115

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

Artinya: ‘Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya (Q.S Al-Baqarah [2]: 188).⁴⁵

b. Harus ada yang dibedakan muslim dan non muslim

Antara subjek zakat dengan pajak, islam membedakan antara muslim dengan non muslim. Non muslim dipungut jizyah, sedangkan zakat hanya bersumber dari kaum muslim dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim.

c. Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memiliki beban utama. Sebagaimana firman Allah SWT,.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
نَّفَعَهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ (219)

⁴⁵ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 29

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan.’demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. (Q.S Al-Baqarah[2]:219).⁴⁶

d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil amri wajib mengadakan kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan inilah Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dori Saputra (2014)	Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Hasil penelitian menunjukkan: 1) rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) rasio efektivitas PAD secara

⁴⁶ Yayasan penyelenggara penerjamaah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Mushaf Albantani dan terjemah (Banten: 2013) h. 34

		<p>rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) trend kemandirian keuangan secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.</p>
Cherrya Dhina Wenny (2012)	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>PAD secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain. PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, atau retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan</p>

		mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Syaripah Rahmawati	Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017 Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Bank Umum Syariah periode 2014-2017 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi, berasumsi VRS dan berorientasi output secara individu menunjukkan hasil bahwa dari delapan bank terdapat tiga Bank Umum Syariah yang mampu menghasilkan serta memperthankan score efisiensi secara maksimum mencapai 100% selama periode pengamatan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu dengan penelitian yang dilakukan oleh Dori Saputra ialah terletak pada alat analisis, Dori menggunakan kausal komparatif, karena membandingkan penelitian yang dia teliti dengan salah satu penelitian terdahulu.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaripah Rahmawati adalah pada sampel yang digunakan, Syaripah menanalisis Bank Umum Syariah bukan menganalisis Pemerintah Daerah.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cherry Dhia Wenny ialah penelitian Cherry menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda, sedangkan penulis menggunakan alat analisisnya yaitu analisis rasio dan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

G. Hipotesis Penelitian

Dari arti katanya, hipotesis berasal dari dua penggalan kata, “*hypo*” yang artinya “di bawah” dan “*thesa*” yang artinya “kebenaran”. Jadi, hipotesis kemudian yang secara penulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesis, dikembangkan menjadi hipotesis.

Menurut Gresswell dalam Hipotesis adalah pernyataan dalam penelitian kuantitatif yang mana peneliti membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan antara atribut atau karakteristik.

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena baru didasari teori bukan fakta.

Hipotesis dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- H_0 : Diduga kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2014-2017 sudah efisien.
- H_1 : Diduga kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2014-2017 belum efisien.
- H_0 : Diduga kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2014-2017 sudah efektif.
- H_2 : Diduga kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2014-2017 belum efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam hal ini penulis menentukan lokasi penelitian di Provinsi Banten. Penulis menganalisa laporan realisasi APBD pada BPKAD setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018. Adapun variabel yang diteliti yaitu efisiensi dan efektivitas keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Kemudian penulis membandingkan kinerja dari kabupaten/kota di Provinsi Banten tersebut.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode-metode yang digunakan untuk menelusuri, mencari dan mengumpulkan data kemudian mengolah, menganalisis dan menafsirkan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran yang objektif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten jika dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, ada Delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang berguna bagi tujuan penelitian populasi dan aspek-aspeknya. Sampel adalah bagian dari populasi yang

⁴⁷Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015), h.148

diambil untuk diteliti.⁴⁸ Metode sampel yang digunakan adalah total sampling. Yang dimaksud total sampling adalah semua populasi dijadikan sampel.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting yaitu sebagai alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dalam penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder ini diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, dari berbagai buku, majalah-majalah dan tulisan-tulisan yang relevan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD periode 2015 sampai dengan 2018 yang berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di BPKAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁸Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015), h.149

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan⁴⁹. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dan sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian seperti keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten tahun 2015-2018 yang diperoleh dari BPKAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.
2. Metode wawancara, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang di wawancarai⁵⁰. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai sekretaris di Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.
3. Metode studi pustaka, adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teoritis dari permasalahan

⁴⁹ Sugiyono, ,Metode Penelitian Kombinasi(Bandung: Alfabeta, 2012), h.308

⁵⁰Ninit Alfianika Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia,(Yogyakarta:Deepublish, 2016), h. 118-119

penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil data-data dari buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang terpercaya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik menganalisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.⁵¹ Langkah-langkah teknik analisis data yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor BPKAD Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten.
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas.
3. Mengukur tingkat efisiensi dengan menggunakan metode DEA, dimana Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas sebagai Output dan PAD sebagai input.
4. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

⁵¹Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015), h.238-239

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan efektivitas serta menggunakan metode Data Envelopment Analysis.

1. Rasio efisiensi keuangan daerah

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat suatu organisasi.⁵² Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja daerah terhadap realisasi penerimaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 60 persen. Semakin kecil rasio efisiensi aka pengelolaan keuangan daerah semakin efisien dan kinerja keuangan pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi ini adalah:⁵³

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman

⁵²Mariasmo, efisiensi dan efektivitas (Jakarta: ANDI, 2004), h.133

⁵³Widodo dalam Stevany H Dethan, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Vol.X, No. 1, (desember 2016), 48

Penilaian Kinerja Keuangan. Berikut tabel yang menunjukkan kriteria rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah:

Tabel 3.1
Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah⁵⁴

Presentase (%)	Penerapan Hasil
>100%	Tidak Efisien
>90%-100%	Kurang Efisien
>80%-90%	Cukup Efisien
>60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

⁵⁴Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, 148

Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Presentase (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

3. Metode Pengukuran Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)

Data Envelopment Analysis (DEA) pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 dan 1979. Semenjak itu pendekatan dengan menggunakan DEA ini banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian operasional dan ilmu manajemen. Pendekatan DEA lebih menekankan pendekatan yang berorientasi kepada tugas dan lebih

memfokuskan kepada tugas yang penting, yaitu mengevaluasi kinerja dari unit pembuat keputusan/UPK (*decision making unit*).⁵⁵

Pengukuran efisiensi pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat aplikasi MaxDEA Pro 8 untuk pengolahan data dan Microsoft Excel 2010 untuk penyajian hasil pengolahan data. Hasil pengolahan menggunakan MaxDEA dimana, *Decision Making Unit* (DMU) yang memiliki nilai efisiensi 1 (satu) merupakan DMU (dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten) yang efisien. Sedangkan DMU dengan nilai efisiensi kurang dari 1 (satu) merupakan DMU yang tidak efisien. Nilai efisiensi ini merupakan nilai efisiensi relative antar DMU dengan DMU yang paling efisien menjadi *benchmark* acuan bagi DMU yang lainnya.

Ada dua model yang sering digunakan dalam pendekatan ini, yaitu model CCR (1978) dan model BBC (1984).⁵⁶

a. Constant Return To Scale (CSR)

Model ini dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsi bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* adalah sama (*constant return to scale*). Artinya, jika ada tambahan *input* sebesar x kali, maka *output* akan meningkat sebesar x kali juga.

⁵⁵Aam Slamet Rusydiana dan Tim SMART Consulting, *Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, (Bogor:SMART Publishing, 2013), 39.

⁵⁶Aam Slamet Rusydiana dan Tim SMART Consulting, *Mengukur Tingkat.....*,21-23

b. Variable Return To Scale (VRS)

Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes dan Cooper (Model BBC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali.

Perkembangan metode DEA pun tentu terdapat kelebihan dan kekurangannya, dalam konteks pengukuran efisiensi sebuah industri. Secara singkat, berbagai keunggulan dan kelemahan metode DEA adalah:⁵⁷

a. Keunggulan DEA

1. Bisa menangani banyak *input* dan *output*.
2. Tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel *input* maupun *output*.
3. Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dibandingkan secara langsung dengan sesamanya.
4. Dapat membentuk garis frontier fungsi efisiensi terbaik atas variabel *input-output* dari setiap sampelnya.

⁵⁷Aam Slamet Rusydiana dan Tim SMART Consulting, *Mengukur Tingkat,,,,,,*,32

5. *Input* dan *output* dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda.
- b. Keterbatasan DEA
1. Bersifat simple specific.
 2. Merupakan *extreme point technique*, kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal.
 3. Hanya mengukur produktivitas relative dari Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) bukan produktivitas absolut.
 4. Uji hipotesis secara statistic dari hasil DEA sulit dilakukan.

Asumsi yang digunakan menggunakan model *Variable Return To Scale* (VRS). Alasan pemilihan skala efisiensi model VRS ini adalah studi ingin mengetahui tingkat efisiensi sebenarnya (tanpa dibatasi oleh kendala apapun).⁵⁸ Hasil dari analisis DEA menghasilkan skor efisiensi dengan orientasi output, pengelolaan keuangan pemerintah daerah efisien apabila mendekati 100% atau dengan dan semakin tidak efisien apabila semakin kecil dari 100%. Pemerintah daerah yang telah efisien dijadikan benchmark bagi anak-anak pemerintah daerah lainnya yang belum efisien untuk mengoptimalkan penggunaan *input* dan *output* yang dihasilkan.

Pada analisis hasil pengolahan data, digunakan pengukuran berorientasi output (output oriented) yang bertujuan untuk menganalisis seberapa

⁵⁸Aan Slamet Rusydiana dan Tim SMART Consulting, *Mengukur Tingkat.....*,24

efisien pemerintah daerah dalam memaksimalkan tingkat *output* dari penggunaan *input*.

G. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono “variabel adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau yang mempunyai variabel tertentu yang ditempatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio keuangan daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi perbandingan antara besarnya	Semakin rendah rasio efisiensi maka	Persen (%)

	<p>biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Yaitu dengan membandingkan antara belanja daerah dengan pendapatan daerah.</p>	<p>pengelolaan keuangan daerah semakin efisien dan kinerja keuangan pemerintah semakin baik.</p>	
<p>Rasio Efektivitas Keuangan Daerah</p>	<p>Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah</p>	<p>Semakin tinggi rasio efektivitas maka pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan kinerja keuangan pemerintah semakin baik.</p>	<p>Persen (%)</p>

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak atau instansi lain yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian. Objek penelitian ini adalah efisiensi dan efektivitas Kinerja Pemda pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio dengan variabel input: Realisasi PAD. Sedangkan variabel output: Realisasi Belanja. Kemudian setelah mengukur dengan analisis rasio, peneliti mengukur dengan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan variabel input: Realisasi PAD, Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan . Sedangkan variabel output: Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Adapun data objek penelitian ini diperoleh dari masing-masing BPKAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Sebelum sampai pada hasil pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas Kinerja Keuangan Pemda. Kabupaten dan Kota yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten, diantaranya: Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Tabel 4.1**Data Sampel Penelitian**

Tahun	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Dana TF PP-Dana Perimbangan
2015	Kota Tangerang Selatan	1.120.064.009.792	1.228.393.889.612	2.602.412.225.495	2.620.858.176.163	707.496.059.913
2015	Kota Tangerang	1.290.411.582.374	1.471.944.383.908	3.379.623.327.247	3.100.146.346.676	1.057.756.756.159
2015	Kabupaten Tangerang	1.585.933.096.436	1.851.195.176.763	4.229.034.302.499	4.011.233.548.871	1.421.247.462.959
2015	Kabupaten Serang	555.212.324.284	579.605.446.965	2.304.837.741.509	2.342.220.890.626	1.114.480.170.958
2015	Kota Serang	93.549.618.840	111.062.806.774	1.105.658.800.589	1.061.917.792.736	670.172.308.659
2015	Kota Cilegon	515.847.612.248	579.585.574.661	1.409.261.799.808	1.463.135.508.371	578.569.089.759
2015	Kabupaten Pandeglang	152.738.318.922	163.921.272.579	2.053.864.858.795	1.820.101.519.958	1.294.374.747.080
2015	Kabupaten Lebak	263.829.616.592	301.549.435.182	2.237.617.202.823	2.092.695.058.672	1.321.281.755.154
2016	Kota Tangerang Selatan	1.243.705.400.000	1.346.240.155.744	2.664.158.764.561	2.888.570.164.488	847.221.054.205
2016	Kota Tangerang	1.441.101.841.668	1.590.080.330.000	3.388.541.592.672	3.695.863.493.123	1.247.006.679.649
2016	Kabupaten Tangerang	1.755.081.466.124	2.054.715.995.931	4.799.673.684.723	4.264.196.848.397	1.674.962.669.359
2016	Kabupaten Serang	564.544.359.031	590.865.666.125	2.468.077.495.354	2.543.616.888.641	1.419.534.466.039
2016	Kota Serang	115.139.113.647	126.900.900.019	1.132.266.273.590	1.129.841.327.429	825.491.157.313
2016	Kota Cilegon	563.851.613.135	567.671.194.175	1.618.573.368.773	1.612.585.018.741	891.105.528.340
2016	Kabupaten Pandeglang	193.616.153.452	198.750.877.114	2.209.655.129.381	1.874.326.384.831	1.653.367.105.148
2016	Kabupaten Lebak	320.167.214.575	304.485.931.938	2.496.433.196.983	2.095.723.566.552	1.620.008.403.077
2017	Kota Tangerang Selatan	1.448.309.462.781	1.622.004.639.363	3.000.278.801.133	2.967.216.989.261	867.028.622.374
2017	Kota Tangerang	1.659.256.959.534	1.991.898.969.395	3.930.164.161.844	3.895.021.035.797	1.322.393.475.160
2017	Kabupaten Tangerang	2.181.164.749.861	2.786.647.279.878	5.313.000.578.276	4.588.971.336.345	1.712.918.716.203
2017	Kabupaten Serang	773.309.234.817	815.399.914.407	2.810.704.635.828	2.344.509.428.480	1.470.127.262.282
2017	Kota Serang	214.818.694.729	232.458.208.409	1.231.344.645.550	1.330.488.751.791	877.330.483.239
2017	Kota Cilegon	763.970.990.417	652.084.326.149	1.708.838.034.694	1.757.162.825.166	847.021.219.673
2017	Kabupaten Pandeglang	351.285.642.716	387.100.584.855	2.465.844.714.731	2.135.758.780.729	1.643.322.506.037
2017	Kabupaten Lebak	454.943.351.087	467.474.538.181	2.421.101.201.524	2.073.695.424.181	1.442.490.404.209
2018	Kota Tangerang Selatan	1.494.034.264.514	1.621.710.653.274	3.211.105.498.451	3.269.629.108.424	889.139.727.314
2018	Kota Tangerang	1.710.362.495.379	1.864.385.584.947	3.971.571.451.402	4.286.607.977.447	1.341.676.525.655
2018	Kabupaten Tangerang	2.494.578.526.844	2.872.568.512.687	5.483.110.413.991	5.327.769.894.091	1.758.969.673.001
2018	Kabupaten Serang	675.514.027.099	697.085.199.649	2.918.628.102.041	2.998.103.708.874	1.546.651.981.229
2018	Kota Serang	151.589.133.197	164.218.548.654	1.242.437.572.372	1.227.871.712.658	735.561.644.568
2018	Kota Cilegon	733.418.732.423	578.335.346.296	1.630.020.024.950	1.589.173.687.634	841.804.102.872
2018	Kabupaten Pandeglang	205.646.028.714	196.996.806.997	2.362.130.982.589	2.092.132.622.127	1.621.594.433.741
2018	Kabupaten Lebak	308.912.592.160	349.363.426.874	2.504.432.439.568	2.082.641.686.369	1.539.049.050.766

Berdasarkan tabel 4.1 banyaknya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 32 data yang merupakan jumlah sampel penelitian selama

tahun penelitian 2015 sampai dengan 2018. Data-data yang digunakan merupakan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

B. Hasil analisis

1. Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Analisis Rasio

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja daerah terhadap realisasi penerimaan daerah. Besarnya rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 2015-2018

No	Nama Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi(%)				Kategori	
		2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Keterangan
1	Kota Tangerang Selatan	100,71	108,42	98,9	101,82	102,4625	TIDAK EFISIEN
2	Kota Tangerang	91,73	109,07	99,11	107,93	101,96	TIDAK EFISIEN
3	Kabupaten Tangerang	94,85	88,84	86,37	97,17	91,8075	KURANG EFISIEN
4	Kabupaten Serang	101,62	103,06	83,41	102,72	97,7025	KURANG EFISIEN
5	Kota Serang	96,04	99,76	108,05	98,83	100,67	TIDAK EFISIEN
6	Kota Cilegon	103,82	99,63	102,83	97,49	100,9425	TIDAK EFISIEN
7	Kabupaten Pandeglang	88,62	84,82	86,61	88,57	87,155	CUKUP EFISIEN
8	Kabupaten Lebak	93,52	83,95	85,65	83,16	86,57	CUKUP EFISIEN

Sumber: olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Hasil perhitungan pada tabel 4.2 merupakan hasil perbandingan Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Daerah dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka rasio efisiensi Pendapatan Daerah dapat diketahui. Secara rata-rata efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, berada pada rasio 96,36 % untuk tahun 2015, 97,2 % untuk tahun 2016, 93,87 % untuk tahun 2017, dan semakin meningkat di tahun 2018 menjadi 97,21. Secara rata-rata, kecenderungan efisien pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dari tahun 2015-2018 sebesar 96,16 % yang berada pada kategori kurang efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi paling rendah atau berada pada angka di bawah 100% untuk tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018 secara berturut-turut 88,62, 84,82, 86,61, dan 88,57 diperoleh Kabupaten Pandeglang berada pada kategori cukup efisien. Sedangkan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi tertinggi berada dalam angka lebih dari 100% untuk tahun 2015 diperoleh Kota Cilegon sebesar 103,82%, tahun 2016

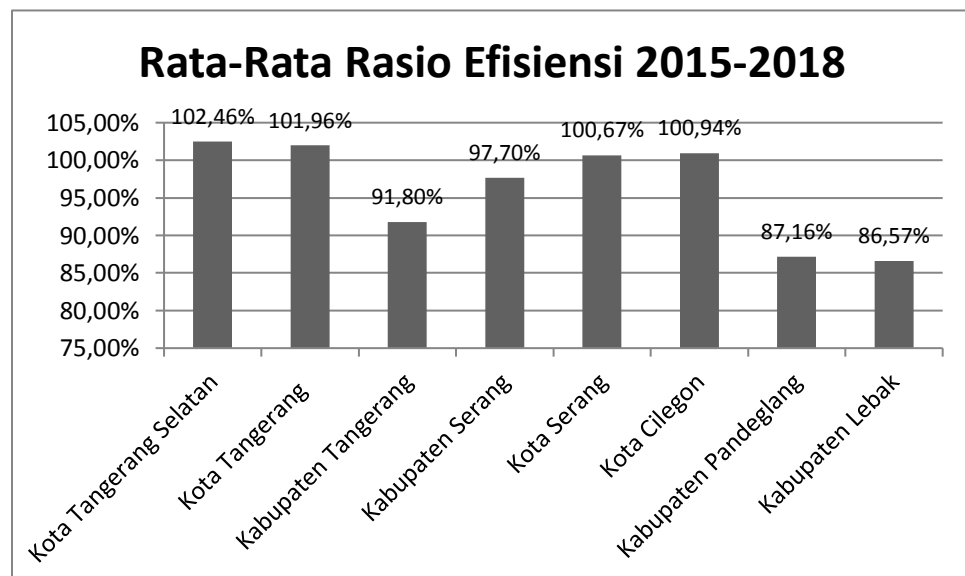
diperoleh Kota Tangerang Selatan sebesar 108,42%, tahun 2017 diperoleh Kota Serang sebesar 108,05%, selanjutnya tahun 2018 diperoleh Kota Tangerang sebesar 107,93%. Semuanya dalam kategori tidak efisien.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah berfluktuasi. Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2018, efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah 96,16% yang berada pada kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah kurang baik.

Dari tabel 4.2 diatas dapat dibuat grafik rata-rata efisiensi keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Grafik 4.1

Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2015-2018



Sumber: olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama 2015-2018 dengan kategori tingkat efisien terendah atau berada pada angka di bawah 100% adalah Kabupaten Lebak sebesar 86,57% menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak cukup efisien, sedangkan rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan kategori tingkat efisiensi tertinggi atau berada pada angka di atas 100% adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 102,46% menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan tidak efisien.

2. Analisis Efektivitas Keuangan Daerah menggunakan Analisis Rasio

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan anggaran penerimaan pendapatan asli daerah. Besarnya rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

**Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 2015-2018**

No	Nama Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas(%)	Tahun				Kategori	
			2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Keterangan
1	Kota Tangerang Selatan	109,67	108,24	111,99	108,55	109,6125	SANGAT EFEKTIF	
2	Kota Tangerang	114,07	110,34	120,05	109	113,365	SANGAT EFEKTIF	
3	Kabupaten Tangerang	116,73	117,07	127,76	115,15	119,1775	SANGAT EFEKTIF	
4	Kabupaten Serang	104,39	104,66	105,44	103,19	104,42	SANGAT EFEKTIF	
5	Kota Serang	118,72	110,22	108,21	108,33	111,37	SANGAT EFEKTIF	
6	Kota Cilegon	112,36	100,68	85,35	78,85	94,31	EFEKTIF	
7	Kabupaten Pandeglang	107,32	102,65	110,2	95,79	103,99	SANGAT EFEKTIF	
8	Kabupaten Lebak	114,3	95,1	102,75	113,09	106,31	SANGAT EFEKTIF	

Sumber: olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Hasil perhitungan pada tabel 4.3 merupakan hasil perbandingan realisasi PAD dan Target PAD dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui. Secara rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, berada pada rasio 112,2% untuk tahun 2015, 106,12% untuk tahun 2016, 108,97% untuk tahun 2017, dan semakin menurun di tahun 2018 menjadi 103,99%. Secara rata-rata, kecenderungan efektivitas PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dari tahun 2015-2018 sebesar 107,82% yang berada pada kategori sangat efektif.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh Kota Serang untuk tahun 2015, tahun 2016, 2017 sampai 2018 diperoleh Kabupaten Tangerang sebesar 117,07% , 127,76%, dan 115,15%, dengan kecenderungan rata-ratanya dari tahun 2015 sampai 2018 adalah 107,82% sehingga berada pada kategori sangat efektif. Sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah terendah, untuk tahun 2015 diperoleh Kabupaten

Serang yaitu 104,39%, dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 112,2%. Di tahun 2016 diperoleh Kabupaten Lebak yaitu 95,1 dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 106,12%. Di tahun 2017 dan 2018 diperoleh Kota Cilegon sebesar 85,35% dan 94,31 dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 102,75% dan 103,99.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah berfluktuasi. Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2018, efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah 107,82% yang berada pada kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerahpun semakin baik.

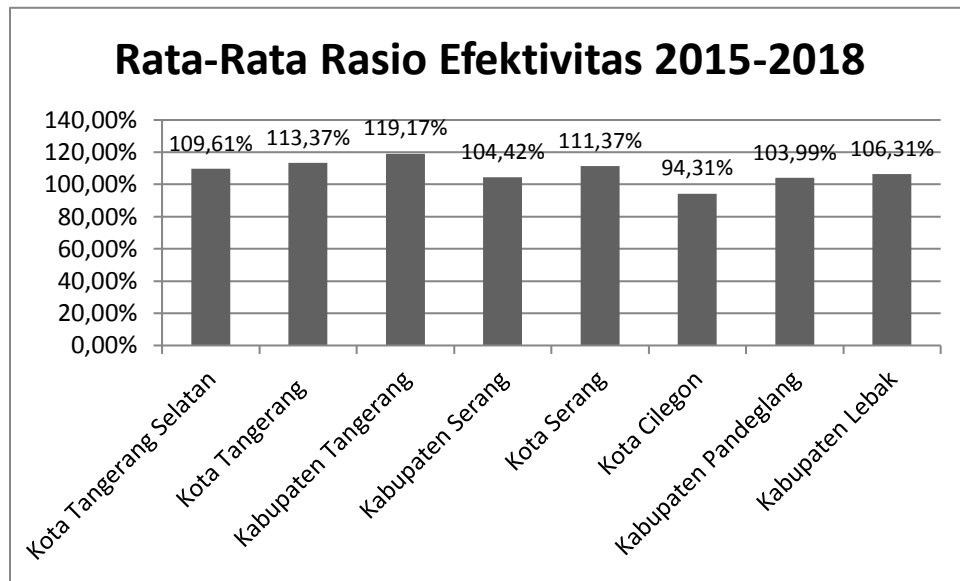
Dari tabel 4.2 diatas dapat dibuat grafik rata-rata efektivitas keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Grafik 4.2

Rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten dan

Kota di Provinsi Banten

Periode 2015-2018



Sumber: olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama 2015-2018 dengan kategori tingkat efektivitas tertinggi adalah Kabupaten Tangerang sebesar 119,17% menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sangat efektif, sedangkan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan kategori tingkat efektivitas terendah adalah Kota Cilegon sebesar 94,31% menunjukkan bahwa Kota Cilegon efektif.

3. Hasil Analisis Metode Non Parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA)

a. Analisis Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

1) Kota Tangerang Selatan

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tingkat Efisiensi Kota Tangerang Selatan (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisien	97,07	100	97,04	96,67

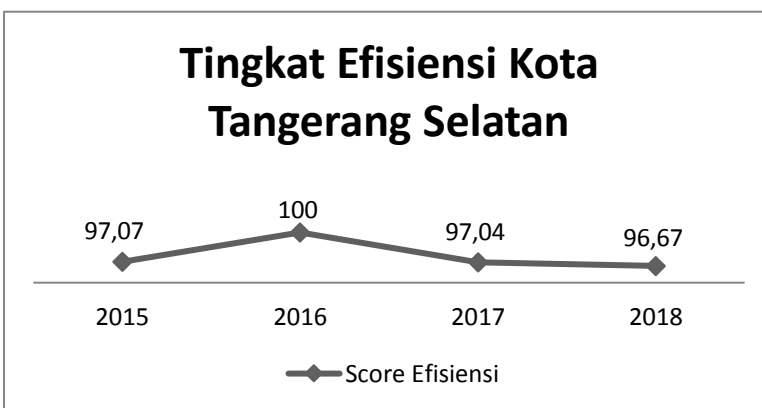
Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan tabel 4.4, Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai oleh Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 yakni sebesar 96,67%. Tingkat efisiensi Kota Tangerang Selatan digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.3

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan daerah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Untuk mengukur penyebab efisiensi terendah yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melalui hasil olah data menggunakan MaxDEA asumsi VRS.

2) Kota Tangerang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Tangerang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Target Efisiensi Kota Tangerang Tahun

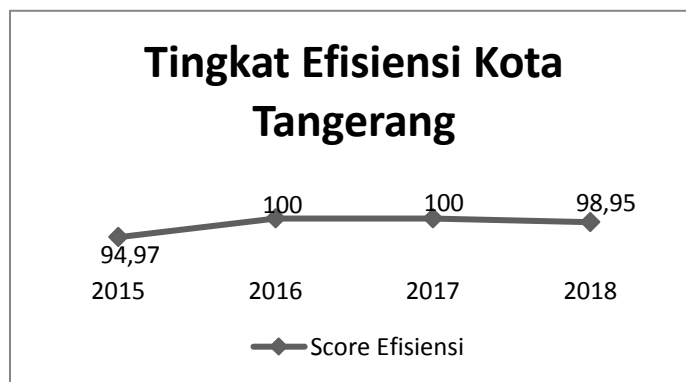
Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	94,97	100	100	98,95

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang menunjukkan angka terendah sebesar 94,97 di tahun 2015. pada tahun 2016 dan 2017, Kota Tangerang memperoleh nilai efisiensi sempurna kembali. Namun pada tahun 2018, Kota Tangerang mengalami penurunan angka presentasi sebesar 98,95%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.4

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Tangerang
Tahun 2015-2018 (%)**



Sumber: olah data MaxDEA Asumsi VRS

Setelah melihat olah data efisiensi tahun 2015 sampai dengan 2018 pada pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan,

terdapat efisiensi terendah di tahun 2015. Maka, perlu dicari penyebab inefisiensi dari hasil input maupun outputnya guna memberikan masukan kepada manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga menghasilkan efisiensi sempurna.

3) Kabupaten Tangerang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten
Tangerang (%)**

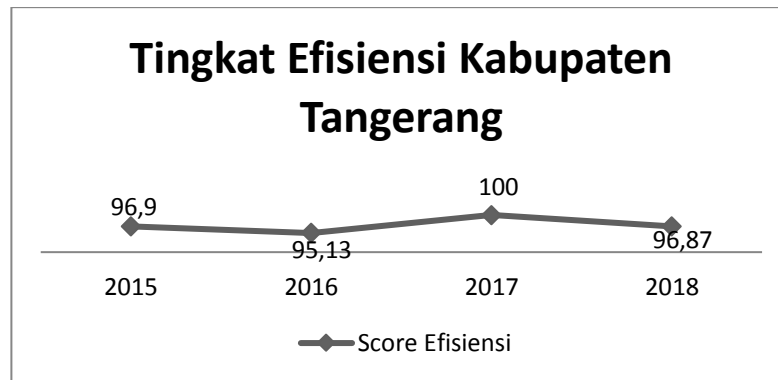
Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisien	96,90	95,13	100	96,87

Sumber: olah data MxDEA asumsi VRS

Berdasarkan tabel 4.8 Kabupaten Tangerang mengalami penurunan efisiensi pada tahun 2016 sebesar 95,13. Nilai tersebut merupakan presentase efisiensi terendah yang dialami oleh Kabupaten Tangerang selama tahun 2015 sampai dengan 2018. Berikut penulis gambarkan tingkat efisiensi Kabupaten Tangerang per tahunnya melalui grafik di bawah ini:

Grafik 4.5

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2015-2018 (%)**



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan grafik 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa pergerakan efisiensi Kabupaten Tangerang menurun pada tahun 2016 dan mulai mencapai efisiensi maksimum kembali di tahun 2017. Dengan demikian, penulis menganalisis hasil efisiensi terendah yang dialami Kabupaten Tangerang, hal yang akan dijelaskan mengenai manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengambil sebuah keputusan, berikut ini hasil olah data MaxDEA dengan metode VRS:

4) Kabupaten Serang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kabupaten Serang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable*

Return To Scale), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Serang (%)**

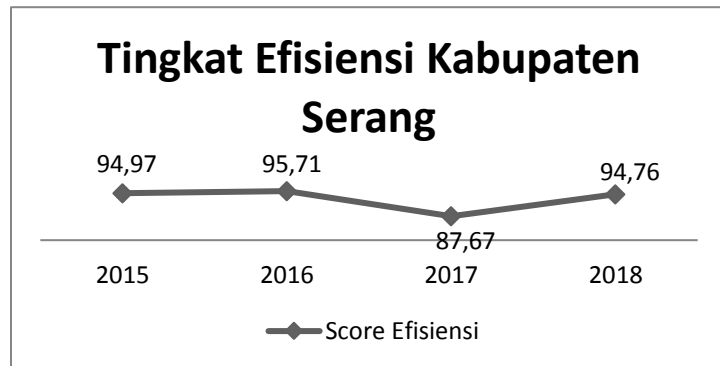
Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	94,97	95,71	87,67	94,76

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai oleh Kabupaten Serang pada tahun 2017 yakni sebesar 87,67%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.6

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2015-2018 (%)**



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Pada tahun 2015, efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang mencapai 94,97%. Tahun berikutnya, terjadi kenaikan angka yang sebesar 0,74%, efisiensi pada tahun 2016 merupakan nilai efisiensi tertinggi yang diperoleh oleh Kabupaten Serang. Namun pada tahun 2017, nilai efisiensi mengalami penurunan dengan presentase sebesar 87,67% dan menjadi nilai efisiensi terendah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Kemudian, tahun berikutnya yaitu tahun 2018 terjadi kenaikan angka kembali yang cukup positif sebesar 7,09%.

Selanjutnya penulis akan menganalisis hasil efisiensi terendah yang diperoleh oleh Kabupaten Serang yaitu pada tahun 2017.

5) Kota Serang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Serang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To*

Scale), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang

(%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	100	100	100	98,63

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan tabel 4.12, pengelolaan keuangan daerah Kota Serang mengalami penurunan efisiensi pada tahun 2018 sebesar 98,63%.

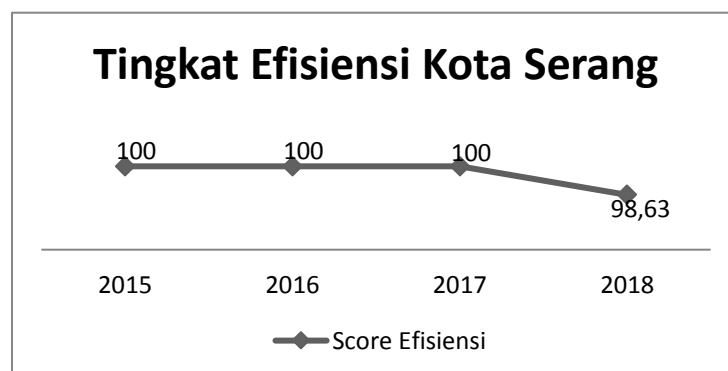
Nilai tersebut merupakan presentase efisiensi terendah yang dialami Kota Serang selama tahun 2015 sampai dengan 2018.

Berikut penulis gambarkan tingkat efisiensi Kota Serang per tahunnya melalui grafik di bawah ini:

Grafik 4.7

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang

Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan grafik 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa pergerakan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Serang menurun pada tahun 2018. Dengan demikian, penulis menganalisis hasil efisiensi terendah yang dialami Kota Serang, hal yang akan dijelaskan mengenai manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam mengambil sebuah keputusan

6) Kota Cilegon

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Cilegon dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	100	92,43	95.3	90,46

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

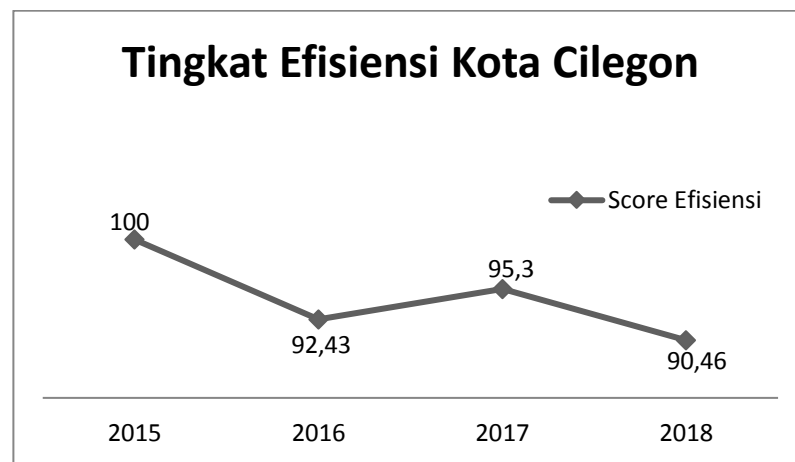
Berdasarkan pada tabel 4.14, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai Kota Cilegon pada tahun 2018 yakni sebesar

90,46%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.8

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon

Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Untuk mengukur penyebab efisiensi terendah yang dicapai oleh Kota Cilegon melalui hasil olah data menggunakan MaxDEA asumsi VRS.

7) Kabupaten Pandeglang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kabupaten Pandeglang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pandeglang (%)**

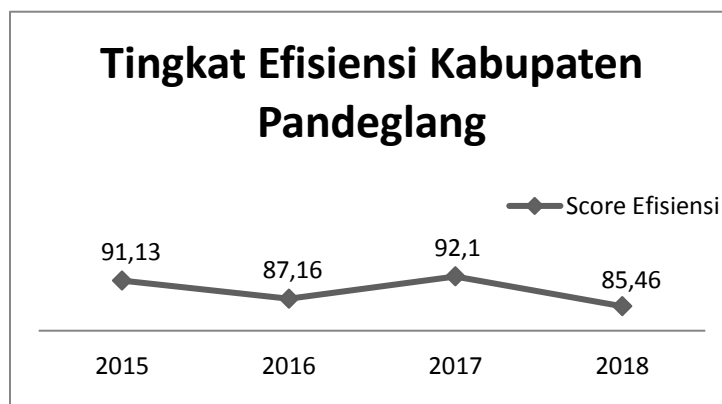
Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	91,13	87,16	92,1	85,46

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai oleh Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 yakni sebesar 85,46%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.9

**Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2015-2018 (%)**



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Pada tahun 2015, efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang mencapai 91,13%. Tahun berikutnya, terjadi penurunan angka yang sebesar 3,97%. Tahun 2017 mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2018 kembali mengalami penurunan, efisiensi pada tahun 2018 merupakan nilai efisiensi terendah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Selanjutnya penulis akan menganalisis hasil efisiensi terendah yang diperoleh oleh Kabupaten Pandeglang yaitu pada tahun 2018.

8) Kabupaten Lebak

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kabupaten Lebak dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	96,54	83	87,32	94,62

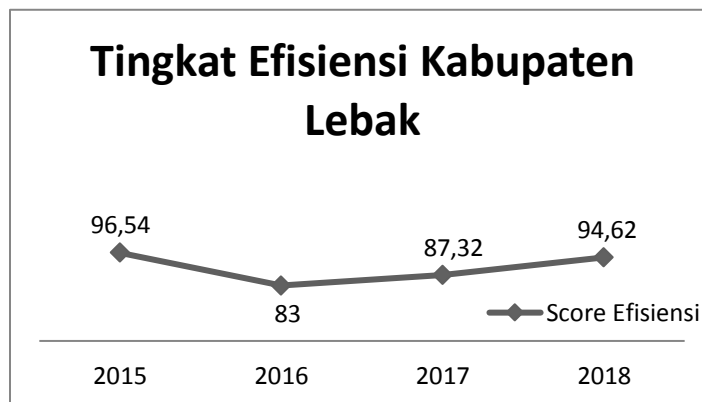
Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebak mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang

dicapai oleh Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 yakni sebesar 83%. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.10

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Pada tahun 2015, efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebak mencapai 96,54%. Tahun berikutnya, terjadi penurunan angka sebesar 13,54%. Tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan. Efisiensi pada tahun 2016 merupakan nilai efisiensi terendah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Dengan demikian, penulis menganalisis hasil efisiensi terendah yang dialami Kabupaten Lebak, hal yang akan dijelaskan

mengenai manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengambil sebuah keputusan.

b. Analisis Efisiensi Rata-rata pengelolaan Keuangan Daerah
Menggunakan *Data Analysisi Envelopment (DEA)*

Tabel 4.12

Efisiensi Rata-rata Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun 2015-2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				MEAN
		2015	2016	2017	2018	
1	Kota Tangerang Selatan	97,07	100	97,04	96,67	97,695
2	Kota Tangerang	94,97	100	100	98,95	98,48
3	Kabupaten Tangerang	96,9	95,13	100	98,87	97,725
4	Kabupaten Serang	94,97	95,71	87,67	94,76	93,2775
5	Kota Serang	100	100	100	98,63	99,6575
6	Kota Cilegon	100	92,43	95,3	90,46	94,5475
7	Kabupaten Pandeglang	91,13	87,16	92,1	85,46	88,9625
8	Kabupaten Lebak	96,54	83	87,32	94,62	90,37
MEAN		96,4475	94,17875	94,92875	94,8025	

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

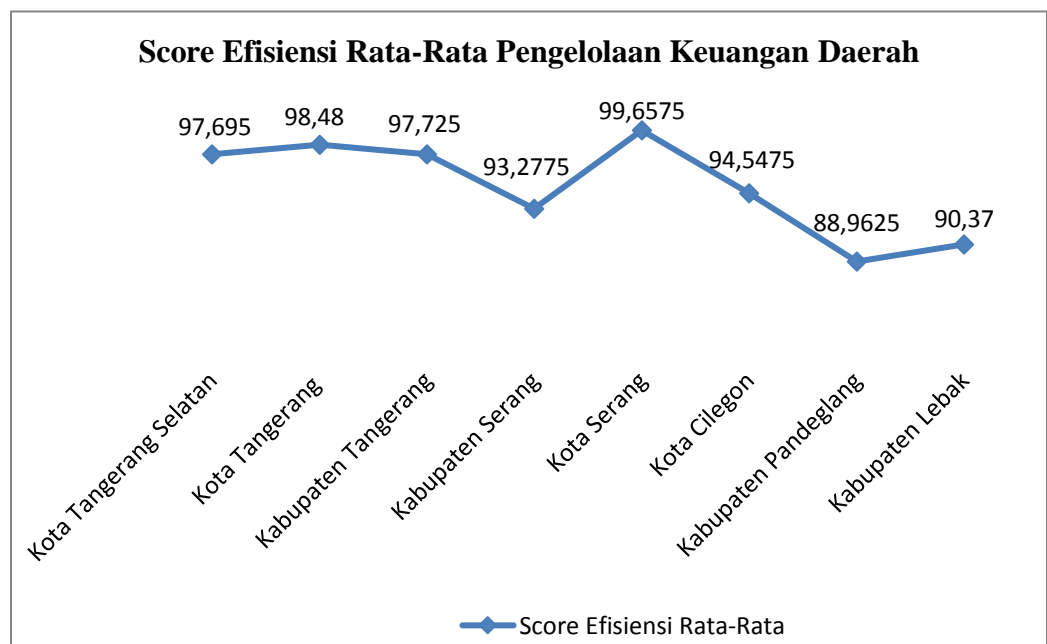
Dari tabel 4.20 dapat dilihat bahwa efisiensi rata-rata pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten per tahunnya memiliki nilai efisiensi kurang sempurna, tidak ada satu pun pemerintah daerah yang mencapai nilai efisiensi sempurna. Pemerintah daerah yang memiliki nilai efisiensi rata-rata tertinggi adalah Kota Serang dengan *score* 99,66%. Sementara pemerintah daerah yang memiliki nilai efisiensi rata-rata terendah adalah Kabupaten Pandeglang

dengan score 88,96%. Berikut grafik efisiensi rata-rata Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:

Grafik 4.11

Score Efisiensi Rata-rata Individu

Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2018(%)



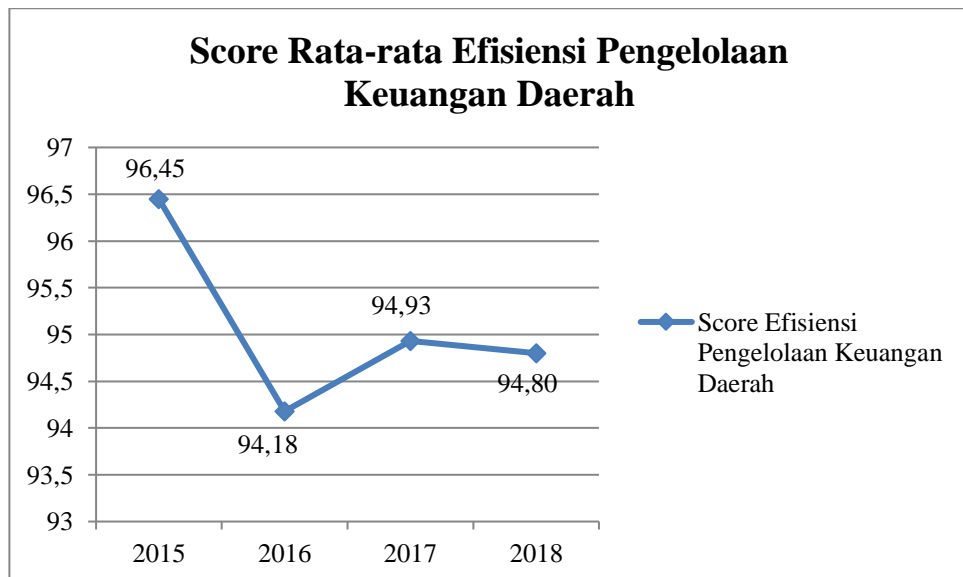
Sumber: Olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan grafik 4.11 dapat dilihat tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara individu bahwa rata-rata efisiensi dari delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, semua tidak ada yang berada dalam efisiensi sempurna.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2015 sampai dengan 2018 yang paling mendekati efisiensi sempurna adalah Kota Serang dengan score rata-rata 99,66(dibulatkan). Score rata-rata efisiensi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten per tahunnya, penulis gambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 4.12

**Score Efisiensi rata-rata Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten
Periode 2015-2018 (%)**



Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan grafik 4.12, score rata-rata efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara keseluruhan dengan studi kasus pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi kinerja efisiensi selama periode pengamatan. Score rata-rata tertinggi efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai efisiensi rata-rata pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sebesar 96,45%.

Pada tahun selanjutnya, efisiensi rata-rata menurun sebesar 2,27% menjadi 94,18. Pada tahun 2017 efisiensi rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,75% menjadi 94,93%. Dan pada akhir tahun penelitian yakni 2018, efisiensi rata-rata pengelolaan keuangan daerah kembali mengalami penurunan sebesar 0,13%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut disajikan hasil penelitian di atas:

1. Hasil analisis tingkat efisiensi Delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018

Belanja daerah haruslah dapat diimbangi dengan penerimaan daerahnya.

Hal ini disebabkan, jika belanja daerah yang tidak dapat diimbangi oleh

penerimaan daerah maka akan terjadi deficit anggaran daerah. Sebaliknya apabila penerimaan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka akan terjadi surplus anggaran daerah. Surplus anggaran daerah ini disebabkan karena adanya efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja daerah terhadap realisasi penerimaan daerah. Semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil perhitungan rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten telah disajikan pada tabel 4.2. Hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015-2018 pada setiap Kabupaten dan Kota antara lain sebagai berikut:

a. Kota Tangerang Selatan

Pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 100,71 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat tidak efisien, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 108,42 persen dengan kriteria tidak efisien. Rasio efisiensi kembali mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 98,9 persen dengan kriteria kurang efisien, kemudian rasio efisiensi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 101,82 persen dengan kriteria tidak efisien karena rasionya di atas 100 persen.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat tidak pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 102,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain seperti dana SILPA, pinjaman kepada pusat atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

b. Kota Tangerang

Pada tahun 2015 rasio Efisiensi sebesar 91,73 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat kurang efisien, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 109,07 persen dengan kriteria tidak efisien. Rasio efisiensi kembali mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 99,11 persen dengan kriteria kurang efisien, kemudian rasio efisiensi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 107,93 persen dengan kriteria tidak efisien karena rasionya di atas 100 persen.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat tidak pengelolaan keuangan daerah yang tidak

efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 101,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain seperti dana SILPA, pinjaman kepada pusat atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

c. Kabupaten Tangerang

Pada tahun 2015 sebesar 94,85 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat kurang efisien, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 88,84 persen dengan kriteria cukup efisien. Rasio efisiensi kembali mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 86,37 persen dengan kriteria cukup efisien, kemudian rasio efisiensi mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 97,17 persen dengan kriteria kurang efisien.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang kurang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 91,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik. Rasio efisiensi

yang tidak melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain seperti dana SILPA, pinjaman kepada pusat atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

d. Kabupaten Serang

Pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 101,62 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat tidak efisien, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 103,06 persen dengan kriteria tidak efisien. Rasio efisiensi mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 83,41 persen dengan kriteria cukup efisien, kemudian rasio efisiensi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 102,72 persen dengan kriteria tidak efisien karena rasionya di atas 100 persen.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang kurang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik.

e. Kota Serang

Pada tahun 2015 rasio efisiensi Sebesar 96,04 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat kurang

efisien, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 99,76 persen dan 108,05 persen dengan kriteria kurang efisien dan tidak efisien. Rasio efisiensi mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 98,83 persen dengan kriteria kurang efisien.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Serang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain seperti dana SILPA, pinjaman kepada pusat atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

f. Kota Cilegon

Pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 103,82 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat tidak efisien, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 99,63 persen dengan kriteria kurang efisien. Rasio efisiensi mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 102,83 persen dengan kriteria tidak efisien, kemudian rasio efisiensi kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 97,49 persen dengan kriteria kurang.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain seperti dana SILPA, pinjaman kepada pusat atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

g. Kabupaten Pandeglang

Pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 88,62 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat cukup efisien, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 84,82 persen dengan kriteria cukup efisien. Rasio efisiensi mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018 sebesar 86,61 persen dan 88,57 persen dengan kriteria cukup efisien.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang cukup efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 87,16 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik.

h. Kabupaten Lebak

Pada tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 93,52 persen berdasarkan kriteria tingkat efisiensi maka efisiensi berada pada tingkat kurang efisien, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 83,95 persen dengan kriteria cukup efisien. Rasio efisiensi mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 85,65 persen dengan kriteria cukup efisien, kemudian rasio efisiensi kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 83,16 persen dengan kriteria cukup efisien.

Apabila dilihat dari rata-rata rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang cukup efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 86,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik.

Dari hasil perhitungan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, daerah yang mengalami penilaian cukup efisien yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan kriteria cukup efisien, namun penilaian efisiensi terbaik diraih oleh Kabupaten Lebak dengan nilai efisiensi terendah yaitu 83,16 persen. Sedangkan daerah yang mengalami penilaian tidak efisien dengan angka tertinggi adalah

Kota Tangerang Selatan yaitu 102,46 persen, karena semakin besar rasio efisiensi maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

2. Hasil analisis tingkat efektivitas Delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018.

Hasil analisis tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat tujuh pemerintah daerah yang dapat dikategorikan sangat efektif yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 109,61%, Kota Tangerang sebesar 113,37%, Kabupaten Tangerang sebesar 119,18%, Kabupaten Serang sebesar 104,42%, Kota Serang sebesar 111,37%, Kabupaten Pandeglang sebesar 103,99%, serta Kabupaten Lebak sebesar 106,31%. Hanya terdapat satu pemerintah daerah yang dikategorikan efektif yaitu Kota Cilegon sebesar 94,31%, Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sudah mampu merealisasikan PAD melebihi target yang direncanakan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik.

3. Hasil pembahasan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)

Hasil analisis tingkat efisiensi Delapan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan asumsi *Variable Return To Scale* (VRS) berorientasi output secara teknis selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa: tidak ada satu pun

pemerintah daerah yang mencapai nilai efisiensi sempurna. Hanya saja ada yang paling mendekati nilai efisiensi sempurna, yaitu Kota Serang dengan score 99,66%. Hal ini dapat diartikan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten belum mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan dikategorikan daerah yang efisien.

D. Analisis Ekonomi

Analisis efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2015 sampai dengan 2018 yang dilakukan penulis menggunakan analisis rasio, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan kategori terbaik dengan kriteria cukup efisien yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Dengan nilai rata-rata sebesar 88,57% dan 87,16%. Setelah menggunakan analisis rasio, penulis kembali menganalisis nilai efisiensi menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) yang menjadikan hasil dari analisis rasio di atas sebagai outputnya.

Analisis efisiensi delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan metode non parametric yang biasa digunakan dalam mengukur efisiensi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa secara individu tidak terdapat satu pun bank yang mampu mencapai tingkat efisiensi secara maksimum selama periode

pengamatan. Terdapat pemerintah daerah yang mendekati score efisiensi sempurna yaitu Kota Serang dengan score 99,66%. Secara keseluruhan tingkat efisiensi dari delapan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten memiliki trend yang berfluktuasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan baik menggunakan analisis rasio maupun menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), tidak ada satupun pemerintah daerah yang mencapai nilai efisiensi sempurna.

Mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan suatu keharusan pemerintah daerah, karena rasio keuangan adalah acuan pemerintah pusat untuk melihat pendapatan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat tujuh pemerintah daerah yang dapat dikategorikan sangat efektif yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 109,61%, Kota Tangerang sebesar 113,37%, Kabupaten Tangerang sebesar 119,18%, Kabupaten Serang sebesar 104,42%, Kota Serang sebesar 111,37%, Kabupaten Pandeglang sebesar 103,99%, serta Kabupaten Lebak sebesar 106,31%. Hanya terdapat satu

pemerintah daerah yang dikategorikan efektif yaitu Kota Cilegon sebesar 94,31%,

Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sudah mampu merealisasikan PAD melebihi target yang direncanakan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik.

2. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018, Efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat dua pemerintah daerah yang dapat dikategorikan cukup efisien yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang sebesar 86,57% dan 87,16%. Terdapat dua pemerintah daerah yang dikategorikan kurang efisien yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang sebesar 91,81% dan 97,70%. Sedangkan terdapat empat pemerintah daerah lainnya yang dikategorikan tidak efisien yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 102,46%, Kota Tangerang sebesar 101,96, Kota Serang sebesar 100,67% dan Kota Cilegon sebesar 100,94%.

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten periode 2015-2018 menggunakan metode Data Analysis Envelopment (DEA) dengan pendekatan intermediasi, berasumsi VRS dan berorientasi output secara individu menunjukkan hasil bahwa

tidak terdapat satu pun pemerintah daerah yang mampu menghasilkan serta mempertahankan score efisiensi secara maksimum mencapai 100%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka butir-butir saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial. Dalam pengelolaan keuangan daerah atau belanja daerah harus lebih cermat agar tidak terjadi inefisien dalam belanja daerah.
2. Bagi masyarakat diharapkan aktif mengontrol dan menilai kinerja pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah, melalui wakil rakyat di DPRD maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian serta dapat menggunakan lebih banyak lagi kajian terhadap variabel yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

4. Penelitian ini bukan penelitian mutlak dalam analisis efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Kiranya dapat dimaklumi jika terdapat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianika, Ninik, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Banga, Wempy, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Devas, dkk, *Keuangan Pemerintah Indonesia, Penterjemah: Marsi Maris*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Edisi Dua*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2010
- Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- *Efisiensi dan Efektivitas*, Jakarta: ANDI, 2004

Rusydiana, Aam Slamet & Tim Smart Consulting. *Mengukur Tingkat Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*. Bogor: SMART Publishing. 2013.

Sedarmayanti, *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Soemantri, Sri, *Otonomi Daerah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015.

----- *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunamo, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ulum, Ihyaul, *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Zaenuddin, Muhammad, *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah*, Malang: Universitas Gadjah Mada, 2007.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Penerjemah: Ahmad S, dkk, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

SKRIPSI dan JURNAL

Dethan, Stevany H, dkk, *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 2016

Dwirandra, *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali*, Jurnal Akuntansi.

Haryanto, Andri, *Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.

- Hidayat, Mochamad Fajar, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*, Skripsi Universitas Negeri Brawijaya, 2013.
- Permana, Dhimas Angga, dkk, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Value For Money*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 2015.
- Rafida, *Analisis Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Jambi*, Jurnal Naral Fiqh, 2014.
- Saputra, Dori, *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*, Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2014.